



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2010 – 2011
Masa Sidang : IV
Rapat : Ke-
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2011
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.35 WIB s.d 16.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Pembahasan Perubahan RKA-KL Perubahan APBN TA. 2011
Ketua Rapat : Ir. H. Mulyadi
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Para Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua membuka rapat pukul 10.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini adalah Pembahasan Perubahan RKA-KL Perubahan APBN TA. 2011.
3. Ketua mempersilakan kepada Sekjen dan para Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya mengenai Perubahan RKA Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN-P 2011.
4. Ketua mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pemanfaatan sisa dan tambahan anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN-P 2011 sesuai dengan ketentuan Inpres No. 7 Tahun 2011 diutamakan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dukungan penyelesaian pembangunan secara tuntas agar berfungsi penuh;
 - b. Mendesak dan strategis;
 - c. Dapat dilaksanakan dalam waktu singkat;
 - d. Ditempatkan pada unit kerja *progress* tinggi sebagai bentuk *reward*;
 - e. Manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar pemanfaatan anggaran sisa tender dalam satu program di Provinsi yang sama, prioritas kegiatan/sub kegiatannya dibahas dengan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum bersikap tegas melaksanakan ketentuan kontrak kerja kepada penyedia jasa.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan hasil evaluasi pekerjaan yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri/*loan* yang sudah selesai dan sedang berjalan.
5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan *progress* masing-masing program dan sub program di tingkat Provinsi maupun di Pusat.
6. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam proses tender/pelelangan agar tidak berlarut-larut sehingga sisa waktu yang tersedia masih mencukupi untuk penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

IR. AGOES WIDJANARKO, MIP

Jakarta, 6 Juli 2011
KETUA RAPAT,

Ir. H. MULYADI